

# “FIGHT FOR” — “FIGHT AGAINST”

Oleh Nurcholish Madjid

Jika kita mengkontekstkan bahasa al-Qur'an mengenai trilogi umat Islam yang kita bahas minggu lalu — *al-khayr, amr ma'rūf, nahy munkar* — padanan istilah bahasa Inggrisnya yang paling mendekati adalah perjuangan proaktif dan perjuangan reaktif. Keduanya sangat penting dan mempunyai fungsinya sendiri-sendiri, namun kita dapat menentukan mana tekanan utama dan mana pula tekanan kedua dalam konteks ruang dan waktu.

Tantangan kehidupan sosial-politik umat Islam dewasa ini terutama tidak lagi bersifat “*fight against*” atau “berjuang melawan” seperti dulu sekitar awal Orde Baru ketika negara terancam oleh berkembangnya ideologi anti-Pancasila dan anti-agama; tetapi — lebih-lebih di era reformasi ini — menuntut kemampuan untuk “*fight for*” atau “berjuang untuk” yakni sikap-sikap proaktif, positif, bukan reaktif, negatif. Agaknya jika — hanya jika — umat Islam mampu melancarkan sikap-sikap proaktif positif ini maka “*raison d’etre*”-nya — alasan rasional mengapa kita merasa meyakini kebenaran agama — akan tetap bertahan dan kukuh. Ini bukanlah suatu Darwinisme, tetapi jelas suatu hubungan sosial yang sistemik dan sibernetik.

Dalam hubungan sosial ini sikap “*fight for*” atau proaktif merupakan kemampuan yang dituntut umat Islam dalam beradaptasi dalam suatu perubahan sosial-politik, sekaligus merupakan persyaratan untuk dapat “*survive*” dalam artian kemampuan terus berkiprah, beradaptasi dan memberi kontribusi kepada kemajuan masyarakat dan bangsa secara proaktif.

Jika secara analitis kita lakukan identifikasi tema perjuangan “*fight against*” tidaklah penting. Identifikasi ini hanyalah untuk memberi tekanan lebih besar kepada salah satu dari keduanya sesuai dengan tantangan zaman; sementara kedua-duanya, mungkin dengan kadar tekanan yang berbeda, dapat berjalan bersama dan seiring. Tetapi jelas ada saat-saat seperti sekarang ini, di era reformasi, ketika salah satu dari keduanya itu — yaitu sikap “*fight for*” — lebih penting daripada lainnya — “*fight against*.”

Dewasa ini tantangan umat Islam mewujudkan agenda-agenda reformasi menuju masyarakat adil, terbuka dan demokratis, merupakan hal yang sangat penting. Pada saat sekarang skala prioritas perjuangan telah berubah. Dalam zaman reformasi ini, yang lebih banyak dituntut ialah kemampuan untuk beradaptasi secara proaktif dan positif. Tekanan lebih diberikan kepada segi “*fight for*.” Yang lebih dipentingkan bukanlah sekadar semangat berapi-api dan berkobar saja, melainkan kemampuan teknis yang tinggi, yang “*highly qualified*,” yang lebih banyak mengarah kepada kecakapan “*problem solving*” daripada “*solidarity making*.” Kemampuan teknis yang tinggi ini memerlukan wawasan keilmuan yang mendalam, disertai keterlibatan yang tulus dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Tekanan kiprah kepada kemampuan “*problem solving*” ini dalam penghadapannya kepada “*solidarity making*” dalam bahasa retorika populer kira-kira dapat disebut sebagai “Hatta-isme” dalam penghadapannya kepada “Soekarno-isme.” Penyebutan ini memang mengandung simplikasi, namun masih dapat dibenarkan, karena memang ciri kepemimpinan Bung Hatta adalah “*problem solving*,” sedangkan ciri kepemimpinan Bung Karno adalah “*solidarity making*.” Saat ini kita lebih banyak memerlukan Hatta-Hatta, dan sedikit saja memerlukan Soekarno-Soekarno, meskipun sejumlah Soekarno masih berguna.

Di samping pentingnya kecakapan “*problem solving*,” bangsa ini tidak akan mampu berperan besar, *resourceful* dan efektif jika tidak memiliki komitmen yang sejati kepada kedaulatan rakyat. Jargon “pemihakan kepada rakyat” sudah merupakan ungkapan harian

di negeri kita — apalagi dalam kampanye pemilu yang lalu. Jelas jargon itu menunjukkan wawasan yang benar dan baik. Namun dalam mewujudkan apa yang dimaksud dengan jargon itu, kita memerlukan ketulusan dalam pengikatan batin kepada maknanya, yaitu pembelaan kaum miskin dan perjuangan meningkatkan kehidupan rakyat pada umumnya. Ketulusan ini adalah “*fardl-u ‘ayn*,” merupakan kewajiban setiap individu tanpa kecuali. Tanpa ketulusan itu, semua perjuangan menjadi *muspra*, hilang tanpa makna.

Indikasi pertama ketulusan itu adalah konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Dan ini menyangkut budi pekerti luhur atau *akhlāq karīmah*: jika memang menghendaki peningkatan peranan dalam hal kerakyatan ini, maka kita harus menciptakan otentisitas dan keabsahan etis dan moral kerakyatan dalam diri kita. Jika kita bicara tentang kerakyatan namun menampilkan diri serba “atas” atau “elit” maka kita akan kehilangan otentisitas dan muspralah seluruh kiprah kita. Ada ungkapan Arab, “bahasa kenyataan adalah lebih fasih daripada bahasa ucapan.” Kita dapat mengatakan apa saja, namun tingkah laku kita akan lebih menentukan keabsahan apa yang kita maksudkan.

Dalam memperoleh otentisitas dan keabsahan ini, penghayatan dan pengetahuan akan nilai yang selalu datang dari bawah tidak pernah dari atas. Jika kita hendak menegakkan kedaulatan rakyat, tidaklah mungkin itu dilakukan dengan mengharap belas kasihan pihak atas, tetapi harus memperjuangkannya dari bawah. Semua teori sosial-politik mengatakan begitu. Pepatah Arab menyebut “hak itu dituntut, tidak dihadiahkan.” Jadi hak rakyat untuk menyatakan kedaulatannya dan diakui kedaulatannya itu, hanya terwujud jika dituntut, dalam arti terus-menerus diperjuangkan dari bawah. Hak itu tidak akan “jatuh” sebagai pemberian dari atas, sebab boleh jadi akan berlawanan dengan kepentingan pihak atas itu.

Menegakkan kedaulatan rakyat memang akhirnya menyangkut peningkatan kesadaran politik rakyat, yaitu kesadaran akan hak-

haknya, sekaligus tentu saja kesadaran dan kewajiban-kewajibannya. Sebab “hak” dan “kewajiban” sesungguhnya adalah dua muka dari satu keping mata uang (*two side of a coin*). Hak kita dari orang lain kepada kita, dan kewajiban kita kepada orang lain akan menjadi hak orang itu dari kita.

Demikian pula antara rakyat dan pemerintah. Jika satu pihak tidak menyadari hak-haknya seperti kebanyakan rakyat yang memang berpikir sederhana, maka ia akan hanya terbebani kewajiban tanpa imbalan yang adil, dan ini adalah kezaliman. Maka jika kita menghendaki masyarakat yang meningkatkan kesadaran politik rakyat berkenaan dengan hak-hak mereka yang sah, baik secara kemanusiaan universal maupun secara ketentuan agama.

Perjuangan dari bawah — sama seperti perjuangan mana pun — memerlukan komitmen batin, wawasan, kemampuan teknis dan, kekayaan pengetahuan dan informasi. Kita tidaklah mungkin akan mampu berjuang dengan berwibawa dan efektif jika kita lakukan dengan “kepala kosong.” Artikulasi yang *resourceful* dan karena itu berwibawa, akan dapat diperoleh hanya jika kepala kita “penuh” dengan informasi yang diperlukan. Informasi adalah pengetahuan pada umumnya, dan menyangkut kemampuan bersikap dinamis itulah yang hendaknya menjadi salah satu tujuan perkaderan *civil society*. Tanpa informasi yang kaya dan dinamis, ungkapan-ungkapan kita akan terdengar kosong sebagai klise dan stereotipe. [❖]